

Pemda Perlu Tingkatkan Komunikasi dengan Warga di Medsos

YOGYA (KR) - Pares Indonesia, sebuah lembaga analisis risiko dan penyelesaian politik yang berbasis di Yogyakarta melakukan riset analisis big data untuk memetakan masalah sampah yang ada, baik di tingkat nasional maupun di tingkat DIY. Analisis big data sebagai representasi suara masyarakat diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah dengan komunitas di akar rumput.

Peneliti Pares Indonesia, Naura Ifitika menuturkan, pengumpulan big data terkait sampah dilakukan mulai 1 Januari 2023-15 Mei 2024. Sumber datanya berasal dari platform media sosial Twitter/X, media massa online (artikel/berita) dan Google Trends. Untuk mereduksi data, digunakan beberapa kata kunci seperti sampah, pengelolaan sampah, TPA dan bank sampah.

"Jumlah data yang ter-

kumpul yaitu di Twitter sebanyak 4.133 tweet dan berita sebanyak 6.048 artikel," terang Naura dalam acara rilis analisis big data berjudul "Trending Sampah: Mencari Solusi Berkelanjutan dari Diskusi Netizen di Sosial Media" di BRI Work Fisipol UGM, Rabu (5/6).

Menurut Naura, dari analisis big data diperoleh ringkasan kunci, antara lain dalam isu sampah ini Yogyakarta menjadi kota

yang mendapat sorotan paling tinggi, disusul Bandung dan Jakarta. Wacana yang mengelilingi isu sampah yakni kota, pembuangan dan pengelolaan. "Sentimen masyarakat terkait

isu sampah ini didominasi sentimen negatif," ujarnya. Lebih lanjut dikatakan Naura, dari analisis big data ini diperoleh kesimpulan, di antaranya, jumlah akun media sosial resmi

pemerintah daerah yang memposting tentang permasalahan sampah, masih sedikit. Artinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui media

sosial mengenai pengelolaan sampah.

Setelah presentasi hasil analisis big data, dilanjutkan tanggapan dari tiga narasumber yang dihadirkan. (Dev)-f

DIGELAR LKBH FH UJB

Penyuluhan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak

YOGYA (KR) - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta (LKBH FH UJB) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di Padukuhan Sumping, Sidomoyo Sleman, beberapa waktu lalu.

Kegiatan bertema 'Kekeerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Perempuan dan Anak' dihadiri pejabat kalurahan, dukuh, dan warga. Penyuluhan menghadirkan narasumber Savira Alfi Syahrin SH MH (Dosen FH UJB) dan Tuti SH MH (Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham DIY).

Dekan FH UJB Dr Sudyana SH MHum menuturkan, penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus wujud dalam menjalankan visi dan misi FH UJB. Menurutnya, tema tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sangat penting, sebab saat ini setiap orang (dewasa, anak-anak) dapat mengakses berbagai informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Dikatakan Sudyana, hampir tiap hari masyarakat disuguhi berita-berita terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). "Perguruan tinggi merasa prihatin terhadap kondisi masyarakat saat ini, khusus-

nya dalam lingkup KDRT. Oleh karena itu sangat perlu diberikan pemahaman tentang bagaimana hukum yang mengatur masalah KDRT," katanya.

Sementara itu, Savira Alfi Syahrin mengatakan, banyak kasus KDRT yang tidak terungkap di masyarakat, dikarenakan belum adanya keberanian dari masyarakat. Selain itu kesam masyarakat terhadap hukum masih belum menyeluruh, bahkan terkesan negatif. Masyarakat banyak yang masih menganggap upaya hukum mahal, lama, ribet dan berbelit-belit serta dapat mencemarkan nama baik keluarga. Hal ini menyebabkan banyak korban memilih diam dan tidak berani speak up.

"Dengan adanya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, sehingga lebih berani untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum terlebih kaitannya dengan KDRT," katanya. (Dev)-f



KR-Istimewa

Penyuluhan hukum oleh LKBH FH UJB dan Kanwil Kemenkumham DIY.

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

HARAPAN 77 TAHUN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Tuntaskan Sampah, Majukan Pariwisata dan Perbanyak Ruang Publik

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota Yogyakarta kini genap berusia 77 tahun. Muncul banyak harapan demi kemajuan kota. Terutama dalam menuntaskan persoalan sampah, memajukan sektor pariwisata hingga memperbanyak ruang publik untuk aktivitas masyarakat.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho, memaparkan sampah masih menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah lantaran bisa berdampak luas pada aktivitas-aktivitas lain. "Ulang tahun Pemerintah Kota Yogyakarta harus menjadi momentum untuk saling evaluasi. Persoalan sampah masih sangat dirasakan oleh masyarakat terutama dalam satu tahun terakhir. Ini perlu untuk dijadikan prioritas pembangunan," harapnya.

Ketika persoalan sampah tidak kunjung selesai maka Yogyakarta sebagai daerah tujuan pariwisata bakal terkena dampak. Secara tidak langsung wisatawan yang mendambakan suasana nyaman dan bersih selama di Yogya justru akan mendapatkan kesan yang sebaliknya.

Nurcahyo yang juga bergelut dalam pengelolaan Kampung Wisata Purbayan Kotagede juga

Nurcahyo Nugroho
Fraksi PKS



KR-Istimewa

berharap, kemajuan industri pariwisata mampu dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu pemerataan kunjungan wisatawan menjadi suatu keharusan. "Jangan hanya sentris di Malioboro tetapi destinasi lain harus ikut didongkrak. Banyak potensi di kampung-kampung wisata yang sangat layak dikun-

jungi wisatawan. Pemerintah harus hadir dalam meratakan kunjungan wisatawan tersebut," imbuhnya.

Hal yang tidak kalah penting ialah keberadaan ruang publik sebagai aktivitas dan interaksi sosial masyarakat. Kendati lahan di Kota Yogya sudah sangat terbatas namun masih banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik. Apalagi ruang publik tidak semata berupa area luas melainkan terdapat sarana penunjang. Terutama yang bisa dimanfaatkan sebagai taman bermain, arena olahraga serta display produk UMKM. Sehingga mulai dari anak-anak hingga orangtua dapat memanfaatkan ruang terbuka dengan nyaman. Tidak hanya aspek sosial dan kesehatan yang terfasilitasi melainkan juga ekonomi.

"Paling tidak tiga hal itu yang menjadi harapan bagi Pemkot Yogya di usia 77 tahun, yakni terselesainya urusan sampah, pemerataan tingkat kunjungan wisatawan serta semakin banyaknya ruang publik. Apalagi Yogya sisi selatan selama ini menyimpan banyak pesona yang bisa menguatkan industri pariwisata di kota ini. Dirgahayu Pemkot Yogyakarta," urai Nurcahyo. (Dhi)-f

MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD KOTA YOGYAKARTA

TETAPKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

Tekan Potensi Silpa, Dukung Pembahasan APBD Perubahan Lebih Awal



KR-Ardhi Wahdan

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari memimpin sidang paripurna, kemarin.

YOGYA (KR) - Lembaga DPRD Kota Yogyakarta sepakat untuk mendukung pembahasan rencana APBD Perubahan Tahun 2024 yang akan diajukan oleh tim eksekutif lebih awal. Perubahan rencana kerja dewan pada tahun anggaran 2024 juga sudah berhasil ditetapkan melalui sidang paripurna yang digelar Jumat (7/6) kemarin. Langkah itu sekaligus menjadi upaya untuk menekan potensi silpa lebih penggunaan anggaran

nantinya akan diuntungkan karena kegiatan sampai akhir tahun akan semakin terarah," ungkapnya di sela sidang paripurna.

Rencana perubahan anggaran biasanya mulai dibahas pada periode Agustus. Sedangkan tahun ini, tim eksekutif rencananya akan menyampaikan penyerahan laporan penyerahan anggaran semester pertama tahun 2024 pada 1 Juli mendatang. Setelah itu akan dilanjutkan skema pembahasan secara intensif mulai dari rencana kegiatan pemerintah hingga pembahasan rencana kegiatan anggaran bersama mitra komisi. Harapannya pada akhir Juli sudah ada kesepakatan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Pemkot Yogyakarta terkait RAPBD 2024.

Ketika sejak pertengahan tahun sudah ada kesepakatan terkait perubahan anggaran maka realisasi hingga akhir tahun akan lebih optimal. Pasalnya, baik eksekutif maupun legislatif memiliki cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan yang difasilitasi oleh anggaran negara. "Semua aspek administratif juga sudah siap. Mulai dari laporan pertanggungjawaban penggunaan APBD tahun 2023, kepastian silpa tahun lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hingga realisasi penyerahan anggaran di semester pertama tahun ini," imbuh Dhian.

Pembahasan RAPBD Perubahan 2024 yang lebih awal juga sama sekali tidak ada muatan politis. Hal ini justru karena secara nasional tahun ini merupakan tahun politik. Selain Pemilu 2024, akhir tahun ini juga akan digelar Pilkada untuk menentukan kepala daerah definitif. Oleh karena itu hampir setiap daerah berupaya melakukan pembahasan anggaran pe-

rubahan lebih awal. Supaya jangan sampai saat gelaran Pilkada pada akhir tahun, pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu.

Dhian yang memimpin jalannya sidang paripurna kemarin menjabarkan, penetapan perubahan rencana kerja dewan menjadi langkah awal untuk dibahas bersama eksekutif. Secara internal, dengan diketukannya perubahan rencana kerja tersebut maka kalangan dewan sudah sepakat sepenuhnya atas kegiatan yang dicoret maupun yang ditambah. "Ruh perubahan rencana kerja kali ini sebenarnya untuk memangkas beberapa kegiatan yang berpotensi menimbulkan silpa. Harapan kami, tahun ini besaran silpa bisa ditekan semaksimal mungkin," jabarnya.

Salah satu kegiatan yang dipangkas ialah fasilitasi pimpinan dewan ke luar negeri. Sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan, kepala daerah dan pimpinan dewan berhak atas perjalanan ke luar negeri untuk menghadiri undangan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan ketugasannya. Dhian menilai, seperti tahun-tahun lalu, fasilitasi itu disepakati untuk dilaksanakan supaya alokasi anggarannya dialihkan untuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. "Kami memandang itu tidak terlalu signifikan sehingga perlu dihapus dan dialihkan. Kalau tidak dihapus dan tidak dilakukan, nanti bisa menimbulkan silpa. Padahal semangat kami di perubahan anggaran saat ini agar semaksimal mungkin menekan potensi silpa," urainya.

Semakin besar silpa yang terjadi, bisa menjadi salah satu indikator terhadap serapan anggaran yang tidak sesuai rencana. Meski demikian, silpa juga



KR-Ardhi Wahdan

Anggota DPRD Kota Yogyakarta khidmat mengikuti jalannya sidang paripurna.

bisa terjadi akibat realisasi pendapatan yang lebih besar dari target. Meski begitu diharapkan besaran silpa tidak mencapai ratusan miliar rupiah seperti yang terjadi beberapa tahun terakhir. Pada APBD 2023 lalu, besaran silpa menembus Rp 278 miliar dan akan dibahas dalam perubahan anggaran tahun ini.

Sementara salah satu kegiatan baru yang akan ditambahkan melalui APBD Perubahan 2024 ialah rencana pembelian insinator atau alat pembakar sampah ramah lingkungan. Dari rencana

awal yang sudah dikomunikasikan oleh eksekutif, akan ada dua alat pembakar sampah dengan total kebutuhan hingga tujuh miliar rupiah. Alat tersebut rencananya akan ditempatkan di area TPA Piyungan yang dikelola Pemkot. "Atas usulan itu, kami di lembaga dewan akan mendukung untuk direalisasikan tahun ini. Sebagai bentuk tanggungjawab moral serta dukungan politik dari kami atas persoalan sampah yang terjadi di Kota Yogyakarta," tandasnya. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono membacakan surat keputusan.



KR-Ardhi Wahdan

Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari menandatangani surat keputusan didampingi Wakil Ketua I HM Fursan, dan Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta Basuki Hari Saksono.